

DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI KOTA PADANG

[The Impact Of Population Growth On Infrastructure In Padang City]

Metra Dewita¹, *Aldhy Rahman Fajar²

¹PKB Kabupaten Limapuluh Kota, BKKBN PProvinsi Sumatera Barat

²Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Email : aldhyrahman99@gmail.com

Absract

Padang City is the capital of West Sumatra where population growth is increasing every year. As the provincial capital, the city of Padang is required to be able to meet and ensure the needs of its residents. Infrastructure plays an important role in supporting this process where its development is regulated by policies (Ismiyati, 2007). The purpose of this research is to identify infrastructure development in Padang, analyze population growth, regional economy, road network and policies that affect infrastructure development in Padang City and evaluate policies that affect infrastructure development in Padang. The method used in this research is descriptive analysis and correlation. The object of this research is to identify population growth and infrastructure development. The primary data required is in the form of photos of the condition of building and transportation infrastructure in the city of Padang, while secondary data is obtained from data issued by related agencies. The data collection technique used is a camera for image and video documentation which serves to support the data. The conclusion of this study is that population density is the most influential factor in the impact of infrastructure development in Padang. The impact caused by population growth is the increasing rate of population growth in suburban areas of Padang City which affects the development of infrastructure in the area. For infrastructure policies, there are still some that need to be updated, because they are still not suitable if implemented in the field. For this reason, this research provides recommendations for infrastructure policies.

Keywords : Population, Infrastructure, Policy

I. PENDAHULUAN

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan ibu kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang merupakan kota inti dari

pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Pertumbuhan penduduk Kota Padang menyebabkan pusat kota menjadi semakin padat sehingga orang mulai bergerak ke pinggiran kota. Kota Padang yang berkembang sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan serta sebagai ibukota provinsi memiliki peran dan daya tarik tidak saja dalam skala lokal tetapi juga regional. Masalah kemacetan transportasi lalu lintas memang sering kali terjadi di Kota Padang. Hal itu terjadi karena konsentrasi kendaraan banyak menumpuk di suatu jalan, sehingga tidak heran bila di kota Padang sering terjadi kemacetan karena kepadatan lalu lintas. Kondisi kemacetan yang terjadi tidak semakin membaik, namun semakin memburuk. Hal itu terjadi karena jumlah kendaraan selalu bertambah dan tidak diimbangi dengan perluasan area jalan raya. Hal ini juga sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang sudah ada masih belum berfungsi dengan baik. penelitian ini bertujuan (1).sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur berkelanjutan di wilayah Padang serta dapat mendukung strategi perencanaan infrastruktur di wilayah Padang, (2). Mengidentifikasi perkembangan infrastruktur di Padang, (3). Menganalisis pertumbuhan penduduk, ekonomi wilayah, jaringan jalan dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di Padang, (4). Mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak pertumbuhan penduduk terhadap infrastruktur di kota Padang dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur yang ada di Padang. Tahapan penelitian dimulai dari studi pustaka, pengumpulan data sekunder mengambil data dari BPS dalam angka kota Padang dan website terkait , pengumpulan data primer yaitu survey kelapangan tentang kondisi infrastruktur kota Padang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kota Padang

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil observasi kondisi kota Padang dapat digambarkan dari kondisi geografis, kondisi topografi, dan kondisi geologi. Ketiga kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan penduduk dan perkembangan infrastruktur di Kota Padang, Dari kondisi geografis Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatra, dengan luas keseluruhan 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatra Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km² wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatra. Selain itu, terdapat pula 19 buah pulau kecil, di antaranya yaitu Pulau Sikuai dengan luas 4,4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan. Dapat dilihat posisi Kota Padang yang strategis menjadikan Kota Padang sebagai pusat kegiatan di Sumatra Barat. Kondisi Topografi Kota Padang dibagi menjadi daerah bawah dan daerah atas. Daerah bawah Kota Padang menjadi pusat kegiatan, sedangkan daerah atas Kota Padang sebagai penunjang untuk kegiatan daerah bawah. Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Padang yaitu kota Padang terdiri dari tiga unit litologi yaitu batuan vulkanik tersier (Tomv), Plio-Plistosen batuan vulkanik dan endapan alluvial kuartar (Qa).

Kondisi Sosial Kependudukan

penduduk paling banyak di provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang adalah sebanyak 833.584 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dari data kependudukan tahun 2008 (856.815 jiwa) akibat peristiwa gempa bumi 2009.[31] Pada akhir tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang melaporkan jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa dengan rincian

273.915 Kepala Keluarga yang terdiri dari 507.785 orang laki-laki dan 492.306 perempuan. Jumlah penduduk kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk Kota Padang

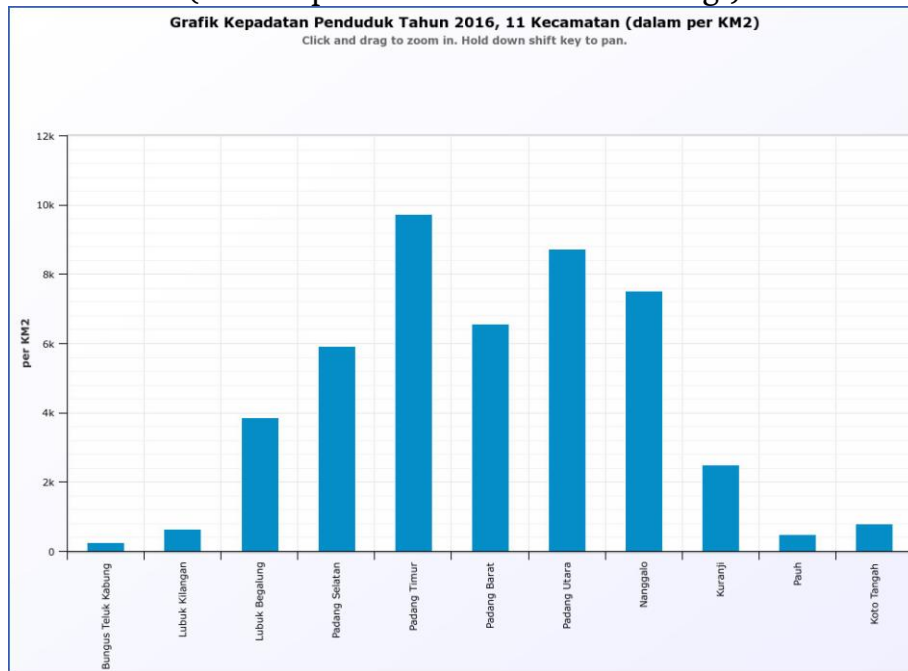
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Total		
	2018	2017	2016
Bungus Teluk Kabung	25 174,00	24 926,00	24 672,00
Lubuk Kilangan	56 214,00	55 381,00	54 529,00
Lubuk Begalung	123 167,00	121 265,00	119 322,00
Padang Selatan	59 962,00	59 748,00	59 523,00
Padang Timur	79 610,00	79 469,00	79 315,00
Padang Barat	46 055,00	46 010,00	45 961,00
Padang Utara	70 951,00	70 794,00	70 624,00
Nanggalo	61 559,00	61 110,00	60 643,00
Kuranji	149 307,00	146 709,00	144 063,00
Pauh	73 686,00	71 965,00	70 225,00
Koto Tengah	193 427,00	189 791,00	186 091,00
Padang	939 112,00	927 168,00	914 968,00

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 penduduk dengan usia produktif masih lebih banyak jika dibandingkan dengan usia non produktifnya. Tetapi prosentase penduduk dengan usia produktif terus mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) yang terdapat di kota Padang berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 660.803 jiwa. Sedangkan usia non produktif yang terdiri dari 240.478 jiwa (usia 0-14 tahun) dan 37.831 jiwa (usia 65+ tahun). Perbandingan Jumlah penduduk usia produktif dan non produktif 3:1. Hal ini berarti pada kota Padang setiap 3 penduduk yang berusia produktif menanggung beban seorang penduduk usia non produktif. Keadaan ini

menguntungkan dan dapat menjadi asset terbesar bagi Kota Padang apabila penduduk usia produktifnya memiliki kualitas yang cukup baik (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) sehingga mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang pada akhirnya berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Grafik yang menunjukkan kepadatan penduduk di Kota Padang Tahun 2016-2018 yang tercantum pada Gambar 1,2 dan 3.

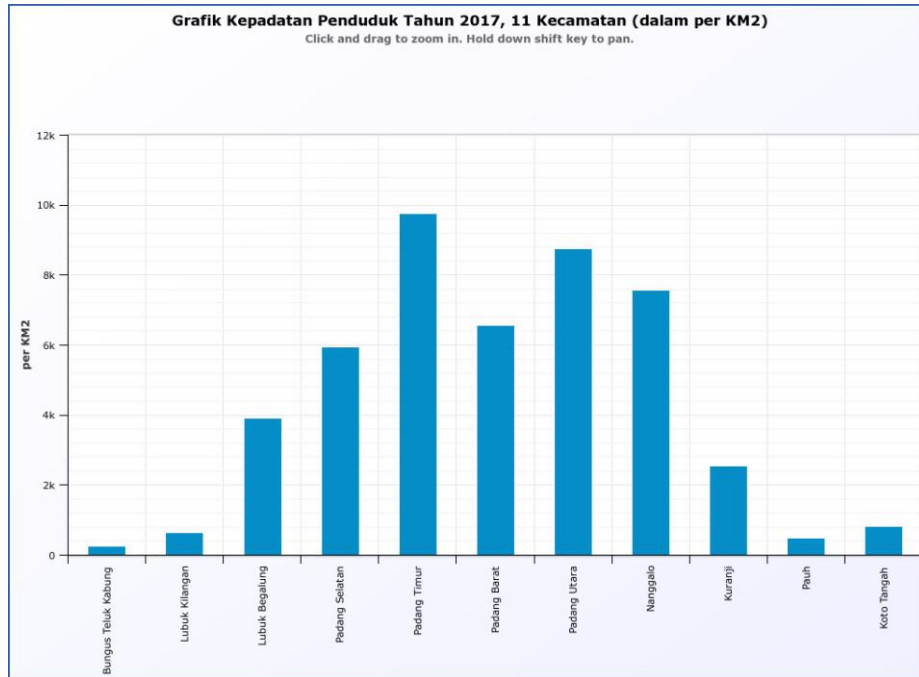
Gambar 1. Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan di Kota Padang tahun 2016

(Badan pusat statistik Kota Padang)

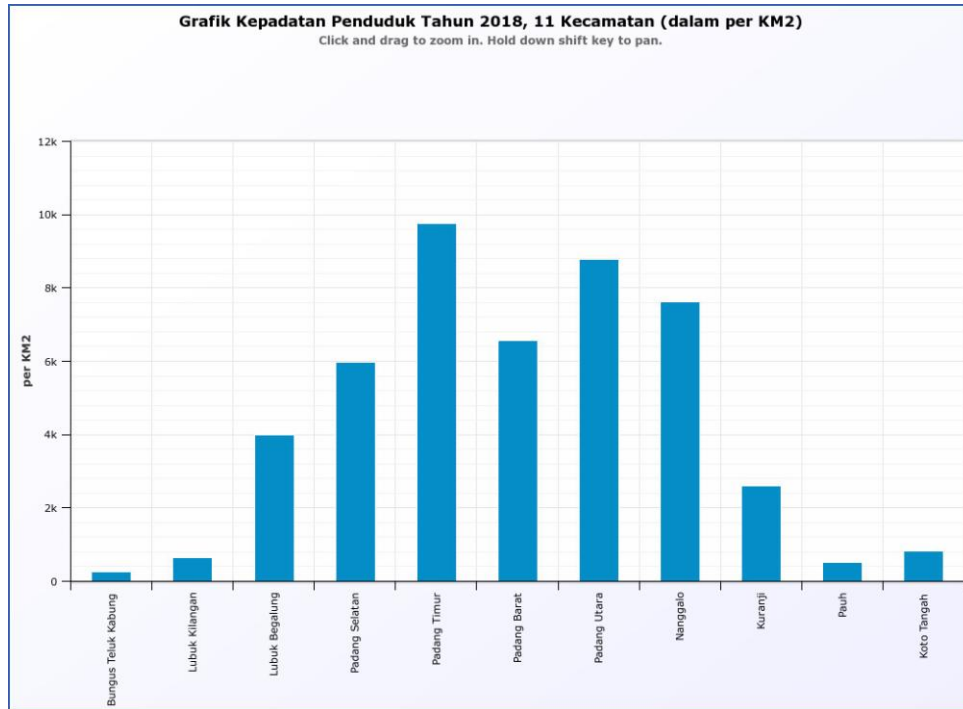


Gambar 2. Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan di Kota Padang 2017

(Badan pusat statistik Kota Padang)



Gambar 3. Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan di Kota Padang 2018
(Badan pusat statistik Kota Padang)



Kondisi Perekonomian

Untuk mengetahui Perkembangan PDRB Kota Padang menurut lapangan usaha Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Tahun 2016-2018

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha		
	2018	2017	2016
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3 705 723,82	3 452 482,63	2 537 994,91
Industri Pengolahan	7 561 206,39	7 628 654,38	1 609 355,88
Informasi dan Komunikasi	3 987 224,38	3 490 684,15	7 323 616,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	907 664,23	811 578,11	50 964,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	2 958 919,67	2 831 269,55	73 972,06
Jasa lainnya	1 537 824,81	1 341 741,65	3 626 182,52
Jasa Pendidikan	2 923 246,17	2 691 481,98	8 237 077,29
Jasa Perusahaan	842 729,33	788 312,18	7 940 344,49
Jumlah	57 519 790,00	53 091 095,10	681 025,32
Konstruksi	6 054 039,40	5 454 168,47	3 145 570,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	84 935,29	77 589,54	2 807 133,84
Pengadaan Listrik dan Gas	59 954,32	56 903,96	1 594 601,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	828 548,92	752 143,33	741 136,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 684 255,20	8 896 514,61	3 092 228,00
Pertambangan dan Penggalian	1 841 354,72	1 697 158,83	2 559 881,65
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 003 005,62	2 797 501,84	738 839,51
Real Estat	1 785 984,57	1 664 715,65	1 200 993,47
Transportasi dan Pergudangan	9 753 173,17	8 660 194,23	49 296 193,38

Dapat dilihat pada Tabel 2 besarnya PDRB dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2016- 2018) ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan yang sangat pesat dan ada juga yang mengalami peningkatan yang standar dari

tahun 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Padang bisa dikatakan berhasil karena tidak pernah mengalami penurunan pada tiap tahunnya

Kondisi Infrastruktur

Profilpanjang jalan kota Padang dilihat dari tabel 3.

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Kondisi Jalan/ <i>Road Condition</i>			
	Baik <i>Good</i>	Sedang <i>Moderate</i>	Rusak <i>Damaged</i>	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Bungus Teluk Kabung	56,06	4,36	30,56	90,98
2 Lubuk Kilangan	62,22	15,56	12,47	90,25
3 Lubuk Begalung	126,67	32,29	22,40	181,36
4 Padang Selatan	68,25	13,48	24,50	106,23
5 Padang Timur	113,75	18,60	13,03	145,38
6 Padang Barat	78,01	9,55	1,70	89,26
7 Padang Utara	132,27	21,88	8,61	162,76
8 Nanggalo	80,93	21,88	12,40	115,21
9 Kuranji	186,43	50,08	70,33	306,84
10 Pauh	123,26	30,08	25,41	178,75
11 Koto Tangah	264,33	88,52	185,06	537,91
## Ruas Jalan Nasional	91,93	-	-	91,93
Jumlah/ <i>Total</i>	1 384,11	306,28	406,47	2 096,86

Sumber : Padang dalam angka 2019

Sarana jalan di Kota Padang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota Tahun 2018 dengan panjang total sepanjang 2.096,86 km dengan rasio panjang jalan dengan rasio kondisi jalan baik mencapai di atas

1384,11 dan rasio jalan rusak mencapai 406,47. Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, penataan wilayah Kota Padang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Pertumbuhan Hotel dan Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu bahwa pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tata ruang kota Padang

Implementasi kebijakan penataan ruang nasional telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan karena sebagian kebijakan pengembangan ruang Kota Padang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan. Kawasan-kawasan yang semestinya dikonservasi untuk mempertahankan fungsi lindung dari kawasan tersebut, justru dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan permukiman, pendidikan dan industri. Aktivitas-aktivitas semacam itu memang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perumahan pendidikan, pariwisata dan berbagai kebutuhan lain, namun di lain pihak aktivitas-aktivitas semacam itu memiliki fungsi yang sangat kontraproduktif dengan fungsi lindung dari kawasan tersebut.

Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Infrastruktur Bangunan dan Transportasi

Untuk angkutan umum di Kota Padang, Semakin rendah tingkat kepadatan pemukiman, semakin kecil jumlah angkutan umum yang tersedia. Dan semakin tinggi tingkat kepadatan pemukiman, angkutan umum yang tersedia semakin banyak. Faktor karakteristik cukup berperan dalam ketersediaan infrastruktur, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan angkutan umum pada suatu pemukiman, diantaranya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, frekuensi pergerakan, moda bepergian, dimana ketiganya saling berhubungan. Tetapi faktor diluar justru lebih berpengaruh, yaitu jarak dari pusat kota, keberadaan jalan utama, dan tingkat kepadatan suatu pemukiman.

IV. PENUTUP

Dari Laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang memiliki kecenderungan bahwa untuk kecamatan-kecamatan yang berada di pusat Kota Padang atau dekat dengan pusat Kota Padang seperti Kecamatan Padang timur memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun. Hal ini dikarenakan kecenderungan sebaran penduduk Kota Padang mengarah kearah pinggiran seperti di Kecamatan Kuranji. Tren meningkatnya penduduk di wilayah pinggiran Kota Padang disebabkan beberapa faktor diantaranya meningkatnya harga lahan di pusat kota. Selain itu, berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa yang membutuhkan dukungan industri yang sebagian besar berada di wilayah pinggiran kota. Dari analisis korelasi kepadatan penduduk berdampak signifikan terhadap perkembangan infrastruktur di kota Padang. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk, semakin banyak ketersediaan infrastrukturnya. Seterusnya Kebijakan-kebijakan yang ada penerapannya belum optimal. Di Kota padang masih mengalami masalah menyangkut prasarana transpotasi, sarana transportasi, pemakai jalan dan lalu lintas. Pihak pemerintah perlu ketegasan dalam menjalankan kebijakannya. Kualitas pelayan angkutan umum di kota Padang juga buruk, sehingga masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi yang pada kenyataannya luas jalan tidak bisa memenuhi kebutuhan perkembangan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik., 2017, Padang dalam angka 2017. BPS, Padang.
- Badan Pusat Statistik., 2018, Padang dalam angka 2018. BPS, Padang.
- Badan Pusat Statistik., 2019, Padang dalam angka 2019. BPS, Padang.
- Ilman, Harris., 1945. Graphic repared by Department of Geography and Earth Sciences. University of North Carolina, Charlotte.
- Yunus, Hadi Sabari. 1994., Teori dan Model Struktur Keruangan Kota. Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari. 2005., Dinamika Wilayah PERI-URBAN Determinan Masa Depan Kota. Cetakan I. ISBN: 978-602-8300-43-8, Yogyakarta.